



Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai)

Sampe Sombo¹, Kristian Hoegh Pride Lambe²,
Johannes Baptista Halik³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 21-06-2025 | Review 27-06-2025 | Revision 01-07-2025 | Accepted 11-07-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dogiyai. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan masih belum konsisten di seluruh unit kerja. Kompetensi SDM yang belum merata serta keterbatasan pelatihan teknis menyebabkan lemahnya penguasaan terhadap sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi seperti SIPD. Implikasi dari pengelolaan keuangan yang belum optimal dan kompetensi SDM yang terbatas berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek ketepatan, akurasi, dan kelengkapan data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem pengawasan internal sebagai strategi utama untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Kompetensi SDM, Kualitas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah, DPMPTSP

Abstract: This study explores the relationship between financial management practices, human resource (HR) competency, and the quality of financial reporting at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Dogiyai Regency. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving officials directly engaged in financial processes. Findings reveal that although financial management procedures are formally established, their implementation remains inconsistent across operational units. The variation in staff qualifications and limited access to structured technical training have hindered the optimal use of financial reporting systems, particularly the SIPD platform. These challenges have led to recurring issues in the accuracy, completeness, and reliability of financial statements. The study underscores the need for continuous capacity development, standardized adherence to financial procedures, and strengthened internal controls to enhance the quality of local government financial reports. These efforts are essential for promoting transparency, accountability, and trust in public financial administration.

Keywords: Financial Management, Human Resource Competency, Financial Reporting Quality, Public Sector Reporting, Local Government Finance

¹E-mail: sampesombo68@gmail.com

²E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

³E-mail: johanneshalik@ukipaulus.ac.id

Pendahuluan

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan menjadi tolok ukur penting dalam menilai akuntabilitas birokrasi dan efektivitas penggunaan anggaran (Mardiasmo, 2009). Salah satu indikator utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah penyajian laporan keuangan yang memenuhi prinsip relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010).

Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan, termasuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dogiyai pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang mengindikasikan masih terdapat penyimpangan material yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan (BPK RI, 2020).

Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban, lemahnya pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Hal ini turut memengaruhi ketepatan, keandalan, dan kelengkapan laporan keuangan yang dihasilkan.

Tabel 1 berikut menunjukkan rangkuman temuan audit yang relevan di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai berdasarkan LHP BPK.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Audit BPK Terkait DPMPTSP Kabupaten Dogiyai (2019–2021)

Tahun	Jenis Temuan	Implikasi terhadap Laporan Keuangan
2019	Kelemahan dokumentasi belanja modal	Data tidak lengkap, sulit diverifikasi
2020	Ketidaksesuaian penggunaan anggaran	Opini WDP, penyajian laporan tidak andal
2021	Keterlambatan pelaporan keuangan	Menurunkan ketepatwaktuan dan akurasi

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua, 2022

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala pengelolaan keuangan di DPMPTSP tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik – mulai dari implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak konsisten hingga kurangnya pelatihan yang terstruktur bagi staf keuangan. Keterbatasan ini berimplikasi langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban publik dan pengambilan keputusan anggaran pemerintah daerah (Mahsun, 2006; Meiryani & Susanto, 2019).

Berbagai studi sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pengelolaan keuangan dan kompetensi SDM. Amalia dan Suwondo (2023) menyatakan bahwa implementasi pengelolaan keuangan yang disiplin serta SDM yang memiliki pemahaman regulatif mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada unit kerja yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penanaman modal di Kabupaten Dogiyai. Mengingat pentingnya laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas dan pengambilan kebijakan, maka upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penguatan pengelolaan keuangan dan kompetensi SDM menjadi sangat mendesak. Selain itu, studi ini dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menjadi referensi dalam menyusun kebijakan peningkatan kapasitas internal secara berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Grand Theory: Good Governance

Penelitian ini berpijak pada teori *Good Governance* sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (World Bank, 1992). Dalam konteks manajemen publik, *good governance* tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tetapi juga pada proses pengelolaan sumber daya publik yang menjamin keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi (Sahrah et al., 2021).

Prinsip *good governance* ini menjadi dasar dari regulasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perspektif Konseptual dan Asumsi Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif, studi ini menggunakan pendekatan *interpretif* untuk memahami praktik pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi publik secara kontekstual dan holistik. Pendekatan ini memandang realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang dipahami melalui interaksi, pengalaman, dan persepsi individu (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks ini, fokus penelitian bukan hanya pada hubungan antarvariabel, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai dinamika praktik dan proses manajerial dalam organisasi.

Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam menginterpretasi makna dari praktik pengelolaan keuangan dan pelaporan berdasarkan pengalaman narasumber dan data dokumen.

Definisi Konseptual dan Operasional Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merujuk pada serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Dalam operasionalisasi penelitian ini, pengelolaan keuangan mencakup kepatuhan terhadap SOP, efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran, serta koordinasi antarunit kerja.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan memperkecil kesalahan pelaporan di sektor publik (Ismail et al., 2020; Bastian, 2018).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM dalam konteks ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap staf keuangan dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman terhadap sistem aplikasi seperti SIPD serta regulasi keuangan pemerintah. Kompetensi SDM yang memadai telah terbukti menjadi determinan penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah (Wicaksono & Herawaty, 2021).

Menurut Sutaryo dan Sinaga (2018), rendahnya kompetensi staf menjadi faktor penyebab kesalahan dalam pelaporan dan ketidaksesuaian dokumen keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dari sejauh mana laporan tersebut memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan kinerja keuangan daerah yang sehat dan mendukung transparansi publik (Suparman, 2020).

Menurut penelitian oleh Meiryani & Susanto (2019), penggunaan teknologi informasi yang tepat serta penerapan pengendalian internal secara efektif juga berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris mendukung temuan bahwa pengelolaan keuangan dan kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Amalia dan Suwondo (2023) dalam studi pada SKPD di Bandung Barat menyatakan bahwa kedua variabel tersebut berkontribusi positif terhadap akurasi dan akuntabilitas pelaporan. Sementara itu, penelitian oleh Maslina (2024) menegaskan bahwa sistem keuangan daerah yang tidak didukung SDM yang mumpuni menyebabkan lemahnya pengawasan internal dan pelaporan yang tidak tepat waktu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dogiyai. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, dan pengalaman subjektif para informan terkait proses manajerial yang berlangsung di lingkungan instansi publik. Model analisis yang digunakan merujuk pada pendekatan interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sebagai lokasi utama. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena instansi ini memegang peran strategis dalam pengelolaan anggaran layanan perizinan dan penanaman modal. Waktu penelitian berlangsung selama empat bulan, yakni dari Maret hingga Juni 2025, dimulai dari tahap pra-penelitian (pengumpulan dokumen awal), wawancara mendalam, observasi lapangan, hingga penyusunan dan validasi hasil temuan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Dogiyai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, maka tidak

diperlukan penetapan sampel secara statistik. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam siklus keuangan, pengalaman kerja, dan pemahaman terhadap sistem pelaporan. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris DPMPTSP, Kepala Bidang Penanaman Modal, serta satu staf dari Inspektorat Daerah yang memiliki peran dalam pengawasan internal keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur dengan informan utama untuk menggali persepsi, kendala, dan praktik aktual pengelolaan keuangan; kedua, observasi langsung terhadap proses administrasi keuangan dan sistem pelaporan di lingkungan DPMPTSP; ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen keuangan seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan hasil audit dari BPK maupun Inspektorat.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data dari wawancara dengan hasil observasi dan dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan member checking untuk memastikan bahwa informasi yang dikutip dari informan sesuai dengan maksud dan pernyataan mereka. Seluruh proses analisis dilakukan secara tematik, yakni mengelompokkan data berdasarkan kategori makna, pola temuan, serta hubungan antar-aspek yang diteliti, seperti implementasi SOP keuangan, kompetensi teknis SDM, dan dampaknya terhadap mutu pelaporan.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai dinamika pengelolaan keuangan publik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan empat informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dogiyai. Karakteristik masing-masing informan disajikan pada **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja	Keterlibatan dalam Keuangan
I1	Kepala DPMPTSP	Magister Administrasi Publik	>10 tahun	Pengambil keputusan strategis
I2	Sekretaris DPMPTSP	Sarjana Ekonomi	8 tahun	Koordinasi pelaporan dan dokumentasi
I3	Kepala Bidang Penanaman Modal	Sarjana Manajemen	6 tahun	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran
I4	Staf Inspektorat Kabupaten Dogiyai	Sarjana Akuntansi	>10 tahun	Pengawasan dan reviu keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2025

Semua informan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang

relevan, namun menunjukkan variasi dalam penguasaan teknis dan keterlibatan pada tiap tahapan siklus keuangan daerah.

Praktik Pengelolaan Keuangan di DPMPTSP Dogiyai

Temuan menunjukkan bahwa meskipun DPMPTSP telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, penerapannya belum berjalan secara konsisten di seluruh bidang. Hal ini ditegaskan oleh I1 (Kepala Dinas), yang menyatakan:

“SOP pengelolaan keuangan sudah tersedia, tapi dalam pelaksanaannya belum dijalankan secara penuh. Masih ada bidang yang belum disiplin mengikuti alur pelaporan.” (Hasil wawancara, 2025)

Hal serupa diungkapkan oleh I2 (Sekretaris DPMPTSP):

“Beberapa bidang sudah menerapkan SOP, tetapi secara umum belum menyeluruh. Ini menyebabkan keterlambatan dan ketidakteraturan dalam administrasi keuangan.” (Hasil wawancara, 2025)

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik operasional dalam pengelolaan keuangan. Lemahnya pengawasan internal dan kurangnya budaya kerja disiplin menjadi hambatan utama dalam mencapai pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kompetensi SDM di bidang keuangan merupakan isu krusial. Beberapa staf memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, namun masih kurang penguasaan terhadap aplikasi sistem keuangan, seperti SIPD. I3 (Kabid Penanaman Modal) menyampaikan:

“Latar belakang pendidikan staf sudah cukup relevan, tapi hanya sebagian kecil yang menguasai SIPD dengan baik.” (Hasil wawancara, 2025)

Sementara itu, I4 (Staf Inspektorat) menambahkan:

“Pelatihan teknis masih sangat terbatas. Tidak ada pelatihan rutin untuk staf keuangan, sehingga kualitas pelaporan sangat bergantung pada orang tertentu saja.” (Hasil wawancara, 2025)

Keterbatasan pelatihan dan ketergantungan pada staf kunci menyebabkan kerentanan dalam sistem pengelolaan keuangan, terutama saat terjadi rotasi pegawai atau perubahan regulasi.

Implikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan DPMPTSP umumnya telah disusun tepat waktu, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek kelengkapan dan akurasi data. I2 menyatakan:

“Beberapa kali laporan harus direvisi karena data dari bidang belum lengkap atau tidak sinkron.” (Hasil wawancara, 2025)

Temuan ini diperkuat oleh pengawasan internal sebagaimana disampaikan oleh I4:

“Masih ada ketidaksesuaian antara data keuangan dan fisik. Beberapa temuan audit menunjukkan dokumen pendukung yang tidak lengkap.” (Hasil wawancara, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan DPMPTSP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keandalan dan akuntabilitas, sebagaimana disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Hambatan yang dominan berasal dari ketidakteraturan dokumentasi, lemahnya koordinasi antarbidang, dan kompetensi SDM yang belum merata.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pengelolaan keuangan, kompetensi SDM, dan kualitas laporan keuangan. Hal ini mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya oleh Amalia dan Suwondo (2023) serta Sutaryo dan Sinaga (2018) yang menyatakan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang tertib serta SDM yang kompeten merupakan prasyarat penting bagi penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan publik (Sahrah et al., 2021). Di sisi lain, perspektif interpretif yang digunakan dalam pendekatan kualitatif memperkuat pemahaman bahwa hambatan dalam pelaporan keuangan tidak semata bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya kerja, dan pola komunikasi internal.

Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan, yakni:

1. Pengelolaan keuangan di DPMPTSP belum optimal akibat lemahnya penerapan SOP dan koordinasi internal.
2. Kompetensi SDM sangat memengaruhi efektivitas pengelolaan, namun pelatihan teknis masih minim.
3. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut dan ditandai dengan masih adanya revisi, ketidaksesuaian dokumen, serta temuan audit.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dogiyai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instansi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, implementasinya masih belum berjalan secara konsisten di seluruh unit kerja. Hal ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tertib administrasi.

Kompetensi SDM juga terbukti menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Kurangnya pelatihan teknis, ketidakseimbangan penguasaan aplikasi keuangan seperti SIPD, serta rotasi pegawai tanpa pendampingan menyebabkan proses keuangan sangat bergantung pada individu tertentu. Ketergantungan ini berisiko menurunkan keberlanjutan dan akurasi dalam sistem pelaporan.

Kualitas laporan keuangan DPMPSTP, meskipun umumnya telah memenuhi aspek ketepatan waktu, masih menghadapi tantangan dari sisi kelengkapan dan keakuratan informasi. Temuan audit yang berulang serta revisi laporan akibat dokumen yang belum lengkap menunjukkan bahwa kualitas pelaporan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib dan kompetensi SDM yang memadai merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengevaluasi praktik keuangan dan keterkaitannya dengan kualitas pelaporan telah tercapai. Meskipun tidak menguji hipotesis secara kuantitatif, temuan kualitatif ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik manajerial dan sumber daya merupakan determinan utama dalam tata kelola keuangan sektor publik.

Keterbatasan dan Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan fokus lokasi yang terbatas pada satu instansi (DPMPSTP Kabupaten Dogiyai). Oleh karena itu, generalisasi hasil ke OPD lain atau daerah lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Selain itu, pendekatan kualitatif bersifat interpretatif sehingga hasil sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan informan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melibatkan lebih banyak unit organisasi (multi-OPD) serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara statistik pengaruh antarvariabel seperti pengelolaan keuangan, kompetensi SDM, dan kualitas laporan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran budaya organisasi dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Amalia, M., & Suwondo, S. (2023). The influence of financial management and human resources competence on local government financial report quality. *Indonesian Accounting Research Journal*, 5(2), 45–56.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889–2903. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Ismail, T., Suhardi, A., & Wiryono, S. (2020). Financial management and its impact on financial reporting quality: Evidence from Indonesian public sector. *Journal of Public Administration Studies*, 12(1), 75–90.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Meiryani, & Susanto, A. (2019). The influence of internal control and information technology on the quality of financial statements in Indonesian local governments. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 243–249.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143021/permendagri-no-77-tahun-2020>
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Sahrah, H., Lestari, T. D., & Mahardika, R. (2021). Good governance practices in public sector: A case study of local government in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 189–205.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Suparman, S. (2020). Organizational commitment and financial report quality in the public sector. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 9(3), 122–130.
- Susanti, R., Lambe, K. H. P., & Gunadi, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Yayasan Kristen Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 47–55. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.301>
- Sutaryo, & Sinaga, J. M. (2018). The effect of human resource competency on the quality of local government financial statements. *Jurnal Keuangan Negara*, 3(1), 55–67.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Wicaksono, D. A., & Herawaty, A. (2021). Impact of HR competencies and internal audit on the quality of local government financial reporting. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 33–48.